



Yogya Perlu Optimalkan Pendapatan dari Pajak Air Tanah

YOGYA (MERAPI) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari pajak air tanah meskipun nilai dari pajak daerah tersebut tidak terlalu signifikan dibanding jenis pajak daerah lain. "Untuk kali ini, kami ingin fokus pendampingan ke pajak air bawah tanah yang ujungnya adalah pendapatan daerah. Realisasinya bisa ditingkatkan," kata Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Wilayah III KPK Edi Suryanto saat bertemu jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta di Yogyakarta, Selasa (8/2).

KPK, lanjut dia, ingin mencari tahu mekanisme pengelolaan pajak air tanah di Kota Yogyakarta, pemantauan, dan mekanisme pembayaran atau pemungutan pajak dari wajib pajak yang selama ini dilakukan.

Menurutnya, dalam dua tahun terakhir, penerimaan dari pajak daerah mengalami penurunan akibat pandemi khususnya dari pajak hotel dan restoran.

Namun demikian, lanjut dia, ada beberapa sektor pajak daerah yang ti-

dak terdampak kondisi pandemi Covid-19 di antaranya BPHTB, pajak mineral, dan pajak air tanah untuk kota/kabupaten atau pajak air permukaan yang dikelola provinsi.

Di Kota Yogyakarta, penerimaan dari pajak air tanah dalam dua tahun terakhir justru mengalami kenaikan yaitu dari Rp1,5 miliar pada 2020 menjadi Rp2,8 miliar pada 2021.

"Peningkatan pendapatan ini menjadi indikasi bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta tetap berusaha mengoptimalkan penerimaan dari pajak daerah meski dalam masa pandemi," kata Sekda Kota Yogyakarta Aman Yuridijaya dilansir dari Antara.

Kota Yogyakarta memfokuskan wajib pajak air tanah berasal dari pelaku usaha, khususnya hotel dan restoran.

Meskipun demikian, lanjut dia, pemanfaatan air dari PDAM Tirtamarta Yogyakarta tetap akan diupayakan untuk ditingkatkan sehingga sumber utama air berasal dari air perpipaan sedangkan untuk air tanah menjadi sumber pelengkap.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi menyebutkan tetap berupaya untuk memaksi-



MERAPI-Humas Pemkot Yogyakarta

Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi (tengah) saat bertemu dengan Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Wilayah III KPK Edi Suryanto (kanan) untuk membahas optimalisasi pajak air tanah, Selasa (8/2).

malkan pendapatan dari pajak air tanah meskipun porsinya tidak begitu besar. "Kami akan kaji dan petakan kembali terkait potensi pendapatan dari pajak air tanah meskipun pemasukan ke daerah tidak sebesar pajak hotel, restoran, PBB dan pajak lainnya," katanya.

Selain mengoptimalkan pendapatan dari pajak air tanah, saat ini Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya untuk memaksimalkan layanan air bersih dari PDAM Tirtamarta untuk masyarakat termasuk ke pelaku usaha seperti hotel dan restoran. (*)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 30 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005